



Media: Harian Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 29 Mei 2021

Halaman: 3

► KISRUH HARGA MAKANAN

PPLM Bantah Bakal Gugat Wisatawan

DANUREJAN—Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro (PPLM) membantah informasi soal bakal adanya gugatan dan pelaporan kepada wisatawan yang protes harga pecel lele di media sosial (medsos). PPLM menyebut bahwa permasalahan itu sudah selesai dan sudah diklarifikasi.

Ketua PPLM, Desio Hartonowati mengatakan tidak ingin kejadian itu kembali ramai dan membuat gaduh. Sebab, pedagang yang disebut memasang tarif tinggi itu juga bukan anggota dari paguyuban mereka. Di sisi lain, Pemkot Jogja dan Pemerintah Kemantren Danurejan serta Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) juga sudah mengkondisikan pedagang itu.

"Saya enggak mau untuk ramai-ramai. Artinya kalau saya pribadi tidak ada pernyataan untuk menggugat itu tidak ada. Sudah klarifikasi di mana-mana juga, jadi sudah pada tahu itu bukan di Malioboro kejadiannya," kata Desio, Jumat (28/5).

Wacana soal penuntutan kepada wisatawan yang protes itu disampaikan oleh Sukidi. Ia merupakan Ketua PPLM lama dan merasa dirugikan soal insiden itu. Sebab, pedagang itu berada di Jalan Perwakilan dan bukan di Malioboro. Sehingga, dia meminta agar warganet atau wisatawan yang protes itu menarik kembali ucapannya.

"Dia itu ketuanya yang lama, sekarang kan saya. Tapi dari saya, ini enggak ada pernyataan bilang menggugat wisatawan. Kami juga sudah klarifikasi dan itu sudah cukup. Itu biar Pemkot Jogja yang menindaklanjuti soal pedagang itu, karena dia juga bukan anggota kami," kata Desio.

Dia menerangkan, pada setiap Lebaran atau momentum libur panjang, paguyubannya selalu menyebarkan daftar harga untuk kemudian dilaporkan kepada UPT Cagar Budaya selaku pengawas. UPT dan paguyuban tinggal mengecek langsung harga itu.

Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta (BP2KY) turut berkomentar soal kejadian wisatawan yang protes soal tingginya harga pecel lele di kawasan Malioboro.

Ketua Unsur Penentu BP2KY, Aldi Fadhlil Diyanto mengatakan hendaknya masyarakat dan juga wisatawan bisa membedakan karakteristik wilayah serta kondisi sosial dan juga ekonominya. Dengan begitu tidak bakal ada kejadian salah tafsir hingga heboh di medsos. "Menurut saya itu kurang bijaksana ya, karena misalkan kita pergi ke Bali lalu ke Denpasar dan Kuta otomatis ada perbedaan harga di situ. Jadi tiap daerah memang beda baik harga makan maupun yang lain sebagainya," kata Jumat. (Yosef Leon Pinsker)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005